

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Rencana strategis (Renstra) Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Proses penyusunan renstra perangkat daerah meliputi: (1) Persiapan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah; (2) Penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah; (3) Penyusunan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah; dan (4) penetapan Renstra Perangkat Daerah.

Renstra perangkat daerah memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan baik ditingkat nasional, provinsi maupun Kabupaten/Kota. Keterkaitan Renstra perangkat daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi, dan dengan Renja perangkat daerah diuraikan sebagai berikut. Penyusunan Renstra Perangkat Daerah mengacu pada tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota, Peraturan Kepala Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota tentang Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, RPJMD Provinsi/Kabupaten/Kota, dan memperhatikan Renstra Kementerian/Lembaga, Renstra Perangkat Daerah Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota, dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Provinsi/Kabupaten/Kota.

RPJMD ini kemudian dijabarkan kedalam RENSTRA SKPD dan menjadi dasar pencapaian kinerja daerah jangka menengah yang dilaksanakan melalui RENSTRA SKPD. Keberhasilan pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah ditentukan oleh keberhasilan pencapaian Visi dan Misi RENSTRA SKPD, dan seluruh RENSTRA mempedomani program prioritas dalam RPJMD selama 5 (lima) tahun.

Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Binjai Tahun 2021-2026 yang dibuat di Tahun 2021. Jadi RENSTRA inilah yang kedepannya akan menjadi pedoman bagi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam melaksanakan semua program dan kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan.

## **1.2. Landasan Hukum**

Adapun yang menjadi dasar hukum dalam penyusunan RENSTRA SKPD antara lain adalah:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Kecil di Lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah;

9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024;
8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12);
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 22);
10. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Binjai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Binjai Nomor 1);
11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
12. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 50);
13. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Binjai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Binjai Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Binjai;
15. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Binjai Tahun 2020-2040 (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Binjai Nomor 33);
16. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;

17. Peraturan Wali Kota Binjai Nomor 37 Tahun 2016 Tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Binjai.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Adapun maksud dari penyusunan RENSTRA Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ini antara lain adalah :

1. Memberikan arahan dan pedoman bagi seluruh personil Dinas PPKB dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya terkait Perumusan Kebijakan Perencanaan Prgram Bangga Kencana;
2. Memberikan informasi pada pemerintah daerah tentang Rencana Program dan Rencana Kerja DPPKB selama 5 (lima ) tahun kedepan;
3. Mempermudah Pengendalian Kegiatan serta Pelaksanaan Koordinasi dengan OPD terkait lainnya, terutama dengan Bappeda dan BPKPAD;
4. Menjadi Kerangka Dasar dalam rangka peningkatan kualitas Kinerja Pelayanan DPPKB yang disesuaikan dengan target pembangunan Daerah, terutama dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahunan.

Sedangkan Tujuan Penyusunan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah :

1. Perencanaan Dinas PPKB selama lima (5) tahun (2021-2026)
2. Tantangan dan peluang serta isu-isu strategis Dinas PPKB selama satu periode penyusunan Renstra.
3. Meningkatkan Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi pembangunan program Bangga Kencana;
4. Meningkatkan kualitas pelayanan publik.

### **1.4. Sistematika Penulisan**

RENSTRA Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Binjai ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Pendahuluan memuat latar belakang, Landasan hukum, Maksud dan tujuan Penyusunan dan sistematika penyusunan

#### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN PD**

Bab ini berisi tentang tugas ,fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) DPPKB, Sumber daya OPD , Kinerja Pelayanan OPD dan tantangan dan peluang pengembangan Perangkat daerah.

### **BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PD**

Bab ini berisi tentang Identifikasi permasalahan berdasarkan Tugas dan fungsi Pelayanan PD, Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah terpilih, telaah Renstra BKKBN Pusat dan / BKKBN Provinsi serta terakhsir penentuan isu-isu strategis;

### **BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

Pada bab ini dibahas mengenai Tujuan dan sasaran jangka menengah DPPKB serta Hubungan tujuan dan sasaran DPPKB dengan tujuan dan sasaran RPJMD Kota Binjai;

### **BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Dalam bab ini diuraikan mengenai Strategi dan arah kebijakan/ pedoman DPPKB untuk mencapai tujuan yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah untuk 5 (lima) tahun kedepan;

### **BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA KERANGKA PENDANAAN**

Bab VI ini membahas mengenai Program RPJMD yang sesuai dengan dengan tugas dan fungsi DPPKB beserta indikator kinerja program dan Pagu yang kemudian dijabarkan ke dalam Rancana Kegiatan untuk setiap program tersebut.

### **BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Bab ini membahas tentang Indikator Kinerja yang direncanakan akan dicapai DPPKB dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mencapai tujuan, sasaran serta program dan kegiatan

### **BAB VIII PENUTUP**

Bab ini merupakan penutup atau akhir dari sususan Rancangan strategik Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ini dimana didalamnya berisikan simpulan dan saran atas RENSTRA Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2021-2026 ini.

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN DINAS PPKB**

#### **2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Dinas PPKB**

Sesuai dengan Peraturan Wali kota Binjai Nomor 37 tahun 2016 Tentang Tugas, Fungsi dan tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Binjai di atur bahwa : Dinas Pengendalian Penduduk dan KB (dulu bernama Badan KB dan PP) mempunyai tugas mendukung program Kepala Daerah Terpilih (Wali kota ) Binjai dalam hal mengatur masalah pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, dibantu oleh seorang sekretaris dan 3 orang Kabid (Kepala Bidang). Sekretaris membawahi 2 (dua) orang Kasubbag (Kepala Sub Bagian) dan Kabid membawahi masing-masing 3 (tiga) orang Kasi (Kepala Seksi). Selain itu di tiap kecamatan di tugaskan seorang Kepala Unit Pelayanan Teknis Dinas (Ka. UPTD) yang membawahi beberapa orang Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) guna membantu melaksanakan program Keluarga Berencana.

Dinas PP dan KB Kota Binjai mempunyai fungsi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat mengenai Kependudukan dan Keluarga Berencana yang berorientasi pada pelayanan yang baik, dengan demikian diperlukan profesionalisme aparatur, transparansi dan akuntabilitas disertai dengan partisipasi dan dukungan masyarakat secara luas dalam upaya menciptakan pemerintahan yang baik (**Good Governance**). Dan selama 5 (lima ) tahun belakangan ini kinerja Dinas PP dan KB dinilai sangat memuaskan, baik itu dalam hal pelayanan kepada masyarakat maupun dalam hal pemenuhan kewajiban penyampaian laporan-laporan ke instansi terkait lainnya.

Untuk melihat Struktur Organisasi berdasarkan Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Binjai dan Peraturan Wali kota Binjai Nomor 37 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Binjai, dijelaskan bahwa DPPKB Kota Binjai dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang membawahi 4 (empat) Bidang, yaitu :

#### **1. Bidang Sekretariat**

Bidang Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang membawahi 2 (dua) orang Kepala Sub bagian, yaitu Kasubbag Perencanaan dan keuangan dan Kasubbag Tata Usaha yang tugasnya membantu Kepala Dinas dalam hal perencanaan program keuangan dan anggaran, dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi;

## **2. Bidang Pengendalian Penduduk, Advokasi dan Informasi;**

Bidang Pengendalian Penduduk, Advokasi dan Informasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang membawahi 3 (tiga) orang Kepala Seksi, yang bertugas antara lain: menyusun dan melaksanakan rencana operasional kegiatan fasilitasi di bidang data pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan ;

## **3. Bidang Keluarga Berencana**

Bidang Keluarga Berencana dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang membawahi 3 (tiga) orang Kepala Seksi, dimana mempunyai tugas antara lain : merumuskan kebijakan program KB, motivasi serta pengendalian dan peningkatan kesehatan reproduksi, pengendalian kelahiran, rencana pendistribusian obat/ alat kontrasepsi, melaksanakan pelayanan KB terpadu, pelayanan dengan Mobil Unit Pelayanan, melakukan pembinaan, bimbingan, penyuluhan, monitoring dan evaluasi serta peningkatan kualitas pelayanan, pengayoman dan rujukan;

## **4. Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**

Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang membawahi 3 (tiga) orang Kepala Seksi, mempunyai tugas antara lain :

penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja, membina, melaksanakan, mengevaluasi dan mengurus operasional kegiatan-kegiatan kelompok kemasyarakatan seperti BKB, BKR, BKL dan IMP serta UPPKS, melakukan koordinasi dengan instansi terkait mengenai kegiatan-kegiatan bagi kelompok-kelompok tersebut dan juga mengadakan lomba-lomba.

## **5. Unit Pelaksana Teknis Badan**

Unit Pelaksana Teknis ditetapkan dengan Peraturan Wali kota setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat.

## **6. Kelompok Jabatan Fungsional**

Jabatan Fungsional pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana hanya di jabat oleh Petugas Lapangan KB (PLKB) dengan SK langsung dari BKKBN Pusat dan digaji dari BKKBN Pusat.

## 2.2. Sumber Daya Dinas PPKB

Jumlah Sumber Daya Manusia pada Dinas PP dan KB (Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana) Kota Binjai per 31 Desember 2020 dan tahun 2021 dapat dilihat pada tabel-tabel berikut :

**Tabel 2.1**  
**Jumlah SDM Dinas PP dan KB Kota Binjai**

No	Uraian	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	<b>Jumlah SDM per 01 Januari 2020</b>	8	24	32
2	<b>Mutasi selama Tahun 2020</b>	1	3	4
	Pensiun	-	1	1
	Mutasi Masuk	1	1	2
	Mutasi keluar	-	1	1
	Berhenti	-	-	0
	Meninggal	-	-	0
3	<b>Jumlah SDM per 30 Desember 2020</b>	9	23	32

Dari jumlah tersebut komposisi SDM berdasarkan jenjang jabatan (peran), strata pendidikan dan golongan SDM menunjukkan keadaan sebagai berikut:

**Table 2.2**  
**Jumlah SDM berdasarkan Jabatan tahun 2021**

No	Uraian	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah (Orang)
1	<b>Pejabat Struktural</b>			
	- Eselon II	-	1	1
	- Eselon III	1	2	3
	- Eselon IV	2	11	13
2	<b>Pejabat Fungsional</b>	4	27	31
3	<b>Pelaksana / Staf</b>	5	9	14
	<b>Jumlah</b>	<b>12</b>	<b>50</b>	<b>62</b>

**Tabel 2.3****Jumlah SDM berdasarkan Strata Pendidikan sejak Tahun 2020**

<b>No</b>	<b>Uraian</b>	<b>Laki-Laki</b>	<b>Perempuan</b>	<b>Jumlah ( Orang )</b>
1	S - 3	-	-	0
2	S - 2	-	4	4
3	S - 1	5	11	16
4	Diploma I/ III/ IV	1	7	8
5	SLTA	2	2	4
6	SLTP		-	0
7	SD	-	-	0
<b>Jumlah</b>		<b>8</b>	<b>24</b>	<b>32</b>

**Tabel. 2.4****Jumlah SDM berdasarkan Golongan (2021)**

<b>No</b>	<b>Uraian</b>	<b>Laki-Laki</b>	<b>Perempuan</b>	<b>Jumlah (Orang)</b>
1	Golongan IV	3	5	8
2	Golongan III	4	16	20
3	Golongan II	2	2	4
4	Golongan I	-	-	0
5	Tenaga Honorer	6	13	19
<b>Jumlah</b>		<b>15</b>	<b>36</b>	<b>51</b>

Untuk tenaga Fungsional Dinas PPKB dibantu oleh 31 orang Petugas Lapangan (PLKB) yang PNS dan 9 orang PLKB Non PNS di tiap-tiap kelurahan yang dipimpin oleh seorang Ka.UPTD di masing-masing kecamatan . PLKB PNS dengan SK dari BKKBN Pusat dan PLKB Non PNS inilah yang menjadi ujung tombak keberhasilan program KB karena mereka yang langsung berhubungan kepada masyarakat, baik itu dalam memberikan pelayanan KB maupun

memberikan penyuluhan tentang KB, sehingga Laju Pertumbuhan penduduk dapat dikendalikan.

Untuk unit usaha yang dikelola oleh Dinas PP dan KB sampai saat ini ada UPPKA (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor), dimana DPPKB memberikan bantuan berupa pembinaan dan juga modal dalam usaha peningkatan kesejahteraan anggota kelompok UPPKA tersebut, sedangkan pembinaan-pembinaan untuk kesejahteraan keluarga yang lain dapat dilihat dengan adanya kelompok-kelompok Tribina Percontohan yaitu : BKB (Bina Keluarga Balita), BKR (Bina Keluarga Remaja) dan BKL (Bina Keluarga Lansia).

Khusus untuk pembinaan Remaja disekolah-sekolah dan di tiap Kelurahan dibentuklah PIK-R (Pelayanan Informasi dan Konseling Remaja) dengan program Genre (Generasi Berencana), semua dibawah pembinaan DPPKB.

Mengenai aset yang berbentuk barang dan kondisi barang yang dimiliki oleh Dinas PPKB dijelaskan dalam tabel 2.5 berikut ini:

**Tabel 2.5**  
**Daftar Kondisi Aset Tahun 2021**

Uraian	Kondisi Barang		Jumlah
	Baik	Rusak	
- Tanah/Bangunan	1487 m2		1487 m2
- Mobil Dinas	0 Unit	1 Unit	1 Unit
- Mobil Mupen	1 Unit		1 Unit
- Mobil Muyan	1 Unit		1 Unit
- Mobil Akseptor	1 Unit		1 Unit
- Mobil Box	1 Unit		1 Unit
- Sepeda Motor	0 Unit	47 Unit	47 Unit
- Mesin Genset	1 Unit		1 Unit
- AC	18 Unit		18 Unit
- Personal Computer	7 Unit		57Unit
- Laptop	10 Unit	1 Unit	11 Unit
- Notebook	2 Unit	1 Unit	3 Unit
- Printer	11 Unit		11 Unit
- PC + Printer	5 Unit		5 Unit

Uraian	Kondisi Barang		Jumlah
	Baik	Rusak	
- Wireless	1 Unit		1 Unit
- Stabilisator	1 Unit		1 Unit
- Dispenser	2 Unit		2 Unit
- Kain gordyn	1 Set		1 set
- Meja Kerja Es. II	1 Unit		1 Unit
- Meja Kerja Es. III	4 Unit		4 Unit
- Meja Kerja Pejabat Lain-Lain	11 Unit		11 Unit
- Kursi Kerja Pejabat	16 Unit		16 Unit
- Kursi tamu	2 set		2 set
- Kamera	3 unit	2 Unit	5 Unit
- Peralatan Studio Visual lain	1 Unit		1 Unit
Public Address	1 Unit	1 Unit	2 Unit
- Mesin Ketik Manual	1 Unit	1 Unit	2 unit
- Meja Rapat	3 Unit		3 unit
- Kursi Rapat	100 Unit		100 Unit

### 2.3. Kinerja Pelayanan Dinas PPKB

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Binjai mempunyai sasaran/ target secara umum adalah untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk dengan program Keluarga Berencana. Untuk sasaran/target Renstra DPPKB adalah tercapainya jumlah penduduk yang seimbang dan terciptanya kesejahteraan serta keluarga yang berkualitas. Program unggulan/ prioritas yang dilaksanakan antara lain:

1. Penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja melalui pembentukan dan pengembangan PIK-R baik PIK-R masyarakat maupun PIK-R Sekolah serta Forum Genre (Generasi Berencana) Kota Binjai.

2. Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera melalui Pembinaan Calon Pengantin yang terintegrasi dengan Dinkes, BNN, Kemenag, Dinsos, TP. PKK dan Disdukcatpil sesuai dengan Peraturan Wali Kota no. 39 Tahun 2017 tentang Standar Prosedur Perkawinan di Kota Binjai.

Hal ini dapat diukur pada kinerja DKBPP antara lain dalam hal:

1. Naiknya persentase CPR (Pemakaian Alat Kontrasepsi)
2. Turunnya TFR ( Angka Kelahiran)
3. Turunnya persentase PUS Unmetneed (Pasangan Usia Subur yang tidak berKB tapi tidak ingin punya anak lagi)
4. Turunnya persentase Perkawinan wanita usia dibawah 21 thn
5. Turunnya Laju Pertambahan Penduduk (LPP)
6. Bertambahnya jumlah anggota PIK-R
7. Bertambahnya jumlah Kelompok Kegiatan (POKTAN) seperti : BKB, BKR, BKR dan Kelompok UPPKA
8. Tersedianya Buku Umpan Balik

Mengenai indikator kinerja DPPKB ini dapat kita lihat pada tabel 2.6 dan 2.7 berikut ini :

**Tabel 2.6**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan DPPKB Kota Binjai**  
**Tahun 2016-2021**

Indikator Kinerja sesuai TUPOKSI	Target IKU	Target IKK	Target Renstra DPPKB Tahun ke							Realisasi Capaian Tahun ke							Rasio Capaian pada Tahun ke						
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
			1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7
<b>Persentase LPP (Laju Pertumbuhan Penduduk)</b>	Persentase LPP (Laju Pertumbuhan Penduduk)	Turunnya LPP	1,21	1,21	1,21	1,21	1,21	1,21	1,21	1,21	1,21	1,21	1,21	1,21	1,21	1,21	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Persentase Angka Pemakaian Kontrasepsi	Persentase CPR	Naiknya CPR	24	24	22	22	22	22	22	21,13	23,46	24,54	24,54	24,54	24,54	24,54	88,04 %	97,75 %	111,55 %	111,55 %	111,55 %	111,55 %	111,55 %
Persentase Angka Kelahiran Total	Persentase TFR	Turunnya TFR	2,21	2,21	2,21	2,21	2,21	2,21	2,21	2,21	2,21	2,21	2,21	2,21	2,19	2,19	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	99,10 %	99,10 %
Persentase Peserta KB Baru	Jumlah Peserta KB Baru (PB)	Bertambahnya PB	84%	85%	85,00 %	80,00 %	80%	80%	80%	74,00 %	74,00 %	74,00%	75,76 %	59,36%	61,20%	74,00%	88,10 %	87,06 %	87,06 %	94,70 %	74,20 %	76,50 %	92,50 %
Pasangan Usia Subur (PUS) yang tidak ingin anak lagi tapi tidak ber KB	Persentase PUS Unmet need	Turunnya PUS Unmet need	12	12	12	14	14	14	14	9,88	11,18	12,11	13,44	13,67	14,28	0	82,33 %	93,17 %	100,92 %	96,00 %	97,64 %	102,00 %	0,00%
Wanita yang menikah pertama usia di	PUS (Pasangan Usia subur)	Turunnya PUS yang istri	600 org	600 org	600 org	600 org	600 org	600 org	600 org	634 org	600 org	634 org	95,00 %	100%	95%	95%	100%	95%	100%				

bawah 20 Thn	yang istrinya dibawah 20 thn	dibawah 20 thn																							
Persentase Remaja yang melahirkan antara 15 - 19 Tahun	Angka Kelahiran Remaja Perempuan per 1000 perempuan usia 15-19 tahun	Penerunan kelahiran bagi remaja perempuan usia 15-19 thn	60,00 %	60,00 %	60,00 %	60,00 %	60,00 %	60,00 %	60,00 %	60,00 %	63,40 %	55,30 %	63,40%	63,40 %	63,40%	63,40%	63,40%	105,67 %	92,17 %	105,67 %	105,67%	105,67%	105,67%	105,67%	105,67%
Persentase Kenaikan Jumlah Kelompok PIK-R	Cakupan jumlah Remaja yang ikut Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R)	kenaikan jumlah kelompok PIK-R	40 klpk	40 klpk	40 klpk	70 klpk	70 klpk	70 klpk	70 klpk	36 klpk	39 klpk	33 klpk	66 klpk	66 klpk	66 klpk	59 klpk	90%	98%	83%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
Kenaikan Jumlah kelompok Kegiatan (POKTAN) di masyarakat	Cakupan Jumlah Anggota Kelompok BKB (Bina Keluarga Balita), BKR (Bina Keluarga Remaja	Kenaikan Jumlah Anggota Kelompok BKB dan BKR	BKB 44 klpk BKR 33 klpk BKB 34 klpk	BKB 44 klpk BKR 33 klpk BKL 34 klpk	BKB 44 klpk BKR 33 klpk BKL 34 klpk	BKB 71 klpk BKR 53 klpk BKL 53 klpk	BKB 71 klpk BKR 53 klpk BKL 54 klpk	BKB 71 klpk BKR 53 klpk BKL 55 klpk	BKB 58 klpk BKR 47 klpk BKL 46 klpk	BKB 44 klpk BKR 33 klpk BKL 34 klpk	BKB 44 klpk BKR 33 klpk BKL 34 klpk	BKB 44 klpk BKR 33 klpk BKL 34 klpk	BKB 71 klpk BKR 53 klpk BKL 53 klpk	BKB 71 klpk BKR 53 klpk BKL 54 klpk	BKB 71 klpk BKR 53 klpk BKL 55 klpk	BKB 58 klpk BKR 47 klpk BKL 46 klpk	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

	a) dan BKR (Bina Keluarga Lansia)																								
	Cakupan Jumlah kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UPPKS)	Kenaikan jumlah Kelompok UPPKS	30 klpk	35 klpk	35 klpk	35 klpk	40 klpk	40 klpk	40 klpk	23 klpk	33 klpk	33 klpk	41 klpk	42 klpk	41 klpk	77%	94%	94%	77%	77%	77%	77%	77%	77%	77%
Cakupan Anggota-kelompok Kegiatan (POKTAN) yang berKB	Cakupan Anggota BKB (Bina Keluarga Balita), BKR (Bina Keluarga Remaja) dan BKR (Bina Keluarga Lansia) dan UPPKS yang berKB	Kenaikan Jumlah PA KB pada BKB, BKR BKL dan PPKS	1580 org	1600 org	1700 org	1558 org	1597 org	1690 org	1690 org	1690 org	1690 org	98,61 %	99,81 %	99,41 %	98,61%	98,61%	98,61%	98,61%	98,61%	98,61%	98,61%				

	Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UPPKS)	Kenaikan Jumlah PA KB pada kelompok UPPKS	250	300	300	300	300	300	300	212	287	296	296	296	296	296	84,80 %	95,67 %	98,67 %	98,67%	98,67%	98,67%	98,67%

**Tabel 2.3.2**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan**  
**Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Binjai**  
**Tahun 2016-2021**

Uraian	ANGGARAN PADA TAHUN KE							REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE							RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE-						RATA-RATA PERTUMBUHAN		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(26)	(27)
<b>BELANJA</b>	<b>8.927.087.447,67</b>	<b>10.296.889.987,50</b>	<b>9.559.927.795,00</b>	<b>9.937.843.655,00</b>	<b>9.204.919.141,00</b>	<b>7.799.191.956,00</b>	<b>8.708.649.035,00</b>	<b>8.224.572.912,00</b>	<b>8.937.177.889</b>	<b>8.877.368.827,00</b>	<b>6.813.102.658,00</b>	<b>7.145.344.306,00</b>	<b>6.761.374.138,00</b>		<b>92,13</b>	<b>86,79</b>	<b>92,86</b>	<b>68,56</b>	<b>77,63</b>	<b>86,69</b>	-	<b>9.204.929.859,60</b>	<b>7.793.156.788,33</b>
<i>Belanja Tidak Langsung</i>	<i>6.118.443.087,67</i>	<i>7.308.687.627,50</i>	<i>6.589.414.935,00</i>	<i>6.589.414.935,00</i>	<i>5.659.180.541,00</i>	<i>4.586.509.698,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5.972.021.998,00</i>	<i>6.305.090.851,00</i>	<i>6.183.744.852,00</i>	<i>3.283.615.969,00</i>	<i>3.693.615.969,00</i>	<i>3.690.083.004,00</i>		<i>97,61</i>	<i>86,27</i>	<i>93,84</i>	<i>49,83</i>	<i>65,27</i>	<i>80,46</i>	-	<i>5.264.521.546,31</i>	<i>4.854.695.440,50</i>
Belanja Pegawai/ Gaji atau Non gaji	6.118.443.087,67	7.308.687.627,50	6.589.414.935,00	6.589.414.935,00	5.659.180.541,00	4.586.509.698,00	0,00	5.972.021.998,00	6.305.090.851,00	6.183.744.852,00	3.283.615.969,00	3.693.615.969,00	3.690.083.004,00		97,61	86,27	93,84	49,83	65,27	80,46	-	5.264.521.546,31	4.854.695.440,50
<i>Belanja Langsung</i>	<i>2.808.644.360,00</i>	<i>2.988.202.360,00</i>	<i>2.970.512.860,00</i>	<i>3.348.428.720,00</i>	<i>3.545.738.600,00</i>	<i>3.212.682.258,00</i>	<i>8.708.649.035,00</i>	<i>2.252.550.914,00</i>	<i>2.632.087.038,00</i>	<i>2.693.623.975,00</i>	<i>3.529.486.689,00</i>	<i>3.451.728.337,00</i>	<i>3.071.291.134,00</i>		<i>80,20</i>	<i>88,08</i>	<i>90,68</i>	<i>105,41</i>	<i>97,35</i>	<i>95,60</i>	-	<i>3.940.408.313,29</i>	<i>2.938.461.347,83</i>
Belanja Pegawai	349.000.000	468.170.000	694.860.000	420.645.000	165.500.000	720.280.000	5.065.407.919,00	330.300.000,00	434.840.000,00	694.860.000,00	445.765.000,00	183.500.000,00	720.280.000,00		94,64	92,88	100,00	105,97	110,88	100,00	-	1.126.266.131,29	468.257.500,00
Belanja Barang Jasa	1.210.246.360,00	1.622.725.360,00	2.017.502.860,00	2.451.651.200,00	3.077.238.600,00	2.013.816.258,00	2.876.695.716,00	1.052.961.314,00	1.314.497.038	1.744.556.175,00	2.611.876.689,00	2.985.882.337,00	1.873.363.634,00		87,00	81,01	86,47	106,54	97,03	93,03	-	2.181.410.907,71	1.930.522.864,50
Belanja Modal	1.249.398.000,00	897.307.000,00	258.150.000,00	476.132.520,00	303.000.000,00	478.586.000,00	766.545.400,00	869.289.600,00	882.750.000	254.207.800,00	471.845.000,00	302.346.000,00	477.647.500,00		69,58	98,38	98,47	99,10	99,78	99,80	-	632.731.274,29	543.014.316,67

#### **2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas PPKB**

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana jenis pelayanan yang diberikan adalah Pelayanan KB yang langsung kepada masyarakat terutama dalam bentuk sosialisasi/ KIE melalui kader-kader KB yang telah dibina baik itu termasuk dalam kelompok Tribina yaitu BKB, BKR dan BKL bekerjasama dengan Posyandu, maupun melalui kelompok UPPKA, disamping itu ada juga yang melalui kelompok PIK-Remaja dan kegiatan-kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan di kampung KB. Dalam melaksanakan program Bangga Kencana ini ada beberapa strategi, kelemahan, tantangan dan peluang untuk di capai kedepan nantinya guna keberhasilan program Bangga Kencana di Kota Binjai. Strategi yang akan dilaksanakan antara lain:

1. Peraturan Wali Kota Tahun 2016 yang menaungi Dinas PPKB untuk berdiri sendiri
2. Mitra kerja yang membantu kinerja seperti TP. PKK, Fapsedu, Koalisi Kependudukan Indonesia Kota Binjai, FKUB (Forum Kerukunan Antar Umat Beragama), Juang Kencana.
3. Rasio PLKB dan IMP sudah mencukupi

Selain strategi yang dimiliki, dinas PPKB juga memiliki kelemahan dalam menjalankan tugasnya. Adapun kelemahan yang dimiliki dinas PPKB antara lain:

1. Dukungan dana atau anggaran untuk kegiatan operasional
2. Belum seluruh faskes bekerjasama dalam pelayanan KB

Setelah menentukan kelemahan, kini saatnya melihat peluang-peluang apa yang ada yang nantinya akan dilaksanakan kedepannya untuk mencapai semua target yang telah ditetapkan di awal perencanaan Renstra DPPKB ini. Adapun Peluang-peluang tersebut antara lain :

1. Adanya data mikro keluarga
2. Sudah adanya perwal tentang standar prosedur perkawinan tahun 2017 dan perwal tentang GDPK tahun 2020
3. TFR yang sudah rendah dan didukung juga terjadinya bonus demografi yang panjang.

Dalam melaksanakan kinerjanya dinas PPKB menghadapi tantangan - tantangan dalam mencapai tujuannya tantangan yang dihadapi adalah Pandemi Covid 19 yang dialami. Dengan adanya Pandemi Covid 19 ini banyak sekali

dampak yang dihadapi terutama dalam faktor ekonomi yang sangat mempengaruhi anggaran. Kurangnya anggaran yang mendukung program/kegiatan Dinas PPKB yang besaran pagunya makin menurun tiap tahun, sehingga banyak kegiatan yang mendukung Program Bangga Kencana tidak dapat dilaksanakan.

### BAB III

#### PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PPKB

##### 3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan DPPKB

Berdasarkan analisis hasil capaian kinerja selama tahun 2016 – 2020 serta identifikasi terhadap tantangan dan peluang yang ada, secara umum permasalahan utama yang dihadapi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Binjai. Oleh sebab itu perlu dilakukan identifikasi masalah untuk menemukan akar masalah dan prioritas masalah yang akan diselesaikan terlebih dahulu .

**Tabel 3.1**

**Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran  
Pembangunan Keluarga pada Dinas Pengendalian Penduduk  
Dan Keluarga Berencana Kota Binjai**

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Kesertaan ber – KB cara modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR) masih kurang optimal	Cakupan pelayanan kesertaan ber – KB Pasangan Usia subur masih belum mencapai target yang ditetapkan	<ul style="list-style-type: none"><li>• Belum optimalnya advokasi/KIE kepada PUS yang belum ber – KB</li><li>• Masih banyaknya masyarakat yang kurang sejahtera tidak ber - KB</li></ul>
2	Masih tingginya jumlah Unmetneed (Kebutuhan ber – KB yang tidak terpenuhi)	Belum maksimalnya tenaga lini lapangan dalam memberikan penyuluhan kepada PUS yang belum ber – KB	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kurangnya pengetahuan PUS tentang alokon, takut efek samping</li><li>• Belum optimalnya interaksi provider KB dalam memberikan informasi tentang alat dan obat kontrasepsi</li><li>• Masih banyak PUS yang ingin anak lagi (IAL)</li><li>• Belum optimalnya</li></ul>

3	<p>Masih rendahnya jumlah keluarga yang ikut serta pada kelompok Tribina (BKB, BKR, BKL)</p>	<p>Belum optimalnya pelayanan dan informasi kepada keluarga mengenai pola asuh balita dan remaja serta pemahaman menjadi lansia tangguh dalam keluarga</p>	<p>pelaksanaan advokasi dan KIE kepada keluarga yang punya balita, remaja dan lansia</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum optimalnya monitoring dan evaluasi terhadap keluarga sasaran</li> <li>• Anggaran yang kurang mendukung terhadap kegiatan pembinaan kelompok tribina</li> </ul>
4	<p>Kualitas remaja tentang perencanaan berkeluarga belum optimal</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Masih rendahnya pemahaman remaja tentang kesehatan reproduksi</li> <li>• Masih kurangnya pemahaman tentang PUP (Pendewasaan Usia Perkawinan)</li> <li>• Masih kurangnya pemahaman tentang bahaya seks bebas dan narkoba</li> <li>• Masih belum optimalnya kegiatan di dalam percepatan penurunan angka stunting</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum seluruhnya remaja yang merupakan sasaran terpapar dengan program Genre</li> <li>• Belum seluruhnya sekolah di Kota Binjai bekerja sama dalam program genre</li> </ul>
5	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kurang pemahaman Catin (Calon Pengantin) untuk menjadikan keluarga sehat dan berkualitas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Masih belum optimalnya kegiatan di dalam percepatan penurunan angka stunting</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kurangnya persiapan fisik, mental, social an ekonomi para remaja Calon Pengantin (Catin) dalam perencanaan keluarga</li> <li>• Masih banyaknya</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tingginya angka stunting nasional</li> </ul>		<p>perceraian karena kurangnya kesiapan fisik, mental, sosial dan ekonomi dan terutama akibat penyalahgunaan narkoba</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum adanya screening dan pendampingan dalam menanggulangi resiko terjadinya stunting</li> </ul>
--	---	--	---

Seperti yang telah diuraikan diatas mengenai program-program Unggulan pada DPPKB terdapat permasalahan-permasalahan juga dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang menjadi prioritas tersebut yang kemudian menjadi isu-isu strategi yang harus segera dicarikan solusinya sehingga pelaksanaan semua program unggulan dapat terealisasi secara maksimal.

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan DPPKB yang intinya adalah pelayanan kepada masyarakat terutama dalam hal pengarahannya, pembinaan dan penyediaan fasilitas guna pengendalian penduduk dan keluarga berencana, dalam melaksanakan tugas dan fungsi diatas ada beberapa masalah yang dihadapi yang menjadi isu strategis yaitu:

1. Masalah kuantitas dan kualitas penduduk khususnya mengenai kesehatan maupun kesejahteraan, mobilitas penduduk, data dan informasi kependudukan;
2. Belum adanya penyerasian kebijakan pembangunan kependudukan, karena masih banyak yang belum sinkron antara satu instansi dengan instansi yang lainnya.
3. Masih kurangnya pemahaman masyarakat dalam memilih dan memutuskan alat kontrasepsi yang sesuai.
4. Masih kurangnya pemahaman remaja dalam persiapan kehidupan berkeluarga.

### 3.2 Telaah Visi, Misi dan Program KDH dan Wakil KDH Terpilih

**Visi** merupakan pandangan dan langkah-langkah ke depan menuju bagaimana mewujudkan Kota Binjai sebagai kota yang lebih maju, berbudaya dan religius. Pandangan tersebut adalah suatu gambaran yang akan dituju tentang keadaan masa depan yang dicita-citakan melalui penggalan aspirasi dan persepsi masyarakat yang telah dilakukan serta dibangun melalui proses refleksi

dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen dan pemangku kepentingan di Kota Binjai.

Adapun pernyataan Visi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Binjai Tahun 2021-2026 adalah :

**“ Mewujudkan Binjai Yang Lebih Maju, Berbudaya dan Religius “**

Adapun maksud dari visi tersebut diatas adalah:

Pembangunan dalam memacu kemajuan Kota Binjai secara terus menerus akan dilaksanakan tidak hanya terkonsentrasi pada fisik seperti infrastruktur, modernisasi teknologi dan informasi serta sarana prasarana umum, tetapi juga peningkatan kualitas masyarakatnya melalui perbaikan mutu layanan kesehatan, pendidikan, merangasng terciptanya lapangan kerja baru melalui pemberdayaan UMKM dan ekonomi kreatif serta mewujudkan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum dengan berpedoman pada nilai – nilai budaya dan religi dengan melibatkan peran serta dan partisipatif masyarakat sehingga tujuan kesejahteraan umum dapat tercapai.

Sedangkan makna dari visi Pemerintah Kota Binjai dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. **Maju** mengandung pengertian bahwa seiring berjalannya waktu, Kota Binjai harus terus maju bergerak kearah yang lebih baik, mengalami peningkatan pada semua aspek kehidupan demi kesejahteraan masyarakatnya.
2. **Berbudaya** mengandung pengertian bahwa pelaksanaan pembangunan Kota Binjai berpedoman pada nilai-nilai dan norma-norma kearifan lokal dalam kebudayaan yang berlaku di masyarakat sebagai filterisasi pengaruh negatif globalisasi. Kebudayaan juga mendukung pembangunan kepribadian dan karakter masyarakat yang lebih baik seperti rukun dan damai, taat azas, taat aturan, peduli dan bertoleransi sehingga tercipta masyarakat yang teratur memiliki ciri khas tersendiri sebagai kota maju dibanding daerah lainnya.
3. **Religius** mengandung pengertian bahwa keyakinan yang berbasis keagamaan menjadi landasan pengikat kebersamaan dalam seluruh aspek penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

**Misi** adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi yang baik membantu memperjelas perwujudan visi yang ingin dicapai dan membantu upaya- upaya strategis yang harus dilakukan. Secara teknis, rumusan misi menjadi penting untuk memberikan kerangka bagi perumusan tujuan dan sasaran yang harus dicapai untuk mewujudkan visi.

Dengan memperhatikan perubahan kondisi yang akan dicapai pada masa yang akan datang dalam rangka mewujudkan “**Binjai yang lebih Maju, Berbudaya dan Religius**”, maka dirumuskan 3 (tiga) Misi dalam rangka pencapaian Visi Pembangunan Kota Binjai tahun 2021- 2026 adalah sebagai berikut :

**Misi 1 : Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Efektif, Efisien, Melayani dan Profesional.**

Misi pertama ini mempunyai pengertian bahwa segala upaya yang dilakukan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, efektif, efisien, melayani dan dapat dipercaya dalam mengemban amanat masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal ini dianggap penting karena untuk menjalankan misi selanjutnya memang dibutuhkan sistem kerja yang baik dan terukur serta Aparatur Sipil Negara yang mumpuni, memiliki etos kerja, etika, kreatifitas dan keahlian dalam bidangnya masing-masing.

Adapun program prioritas dalam mewujudkan Misi Pertama adalah:

1. Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi (IT) dan sistem layanan yang terintegrasi.
2. Perubahan budaya Aparatur Sipil Negara kearah melayani dan mengayomi serta peningkatan SDM berbasis akhlak dan wawasan kebangsaan.
3. Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima.
4. Penempatan pejabat Aparatur Sipil Negara sesuai disiplin ilmu yang dimiliki (*the right man on the right place*).

**Misi 2 : Meningkatkan Infrastruktur Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Pemberdayaan Masyarakat yang Berwawasan Lingkungan.**

Meningkatkan infrastruktur pertumbuhan ekonomi berbasis pemberdayaan masyarakat yang berwawasan lingkungan adalah upaya pemerintah sesuai kewenangan dan sumber daya yang tersedia untuk membangun sarana prasarana (infrastruktur) dan penunjangnya yang dibutuhkan dan memiliki daya dorong terhadap laju pertumbuhan perekonomian berbasis potensi khas daerah dengan memberikan ruang bagi partisipasi masyarakat serta tetap memperhatikan keseimbangan lingkungan hidup.

Dalam rangka mewujudkan Misi Kedua, pelaksanaan pembangunan infrastruktur bertumpu pada pengembangan industri jasa, perdagangan, sumber daya manusi dan sumber daya fisik (buatan) serta memperhatikan keterpaduan dengan tata ruang wilayah. Hal ini dimaksudkan untuk meminimailsir dampak negatif yang terjadi akibat pembangunan yang kurang meperhatikan kapasitas

sumber daya yang ada. Beberapa program prioritas untuk meningkatkan ketersediaan infrastruktur dan keterpaduan tata ruang wilayah, antara lain :

1. Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar wilayah yang menyebar dan merata.
2. Pemanfaatan sumber daya alam lokal untuk peningkatan perekonomian masyarakat dengan memperhatikan aspek lingkungan.
3. Pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan kemampuan pengelolaan dan permodalan bagi koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).
4. Peningkatan kualitas SDM pencari kerja.
5. Pengembangan sentra – sentra industri potensial dan produk lokal.
6. Mendorong dan memfasilitasi pertumbuhan industri perdagangan dan jasa serta industri ekonomi kreatif.
7. Peningkatan penegakan hukum lingkungan.

**Misi 3 : Mewujudkan Sumber Daya Manusia dan Masyarakat Kota Binjai yang Berkualitas.**

Misi ini merupakan upaya Pemerintah Daerah sesuai kewenangan dan sumber daya yang tersedia untuk meningkatkan sarana prasarana (infrastruktur) pendidikan, mutu pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial dalam rangka memacu kualitas sumber daya manusia yang handal, produktif, memiliki kondisi jiwa raga yang sehat dan sejahtera serta memiliki kearifan budaya dan akhalkul kharimah. Adapun program prioritas untuk mewujudkan Misi Ketiga adalah :

1. Meningkatkan kualitas SDM yang berlandaskan iman dan taqwa.
2. Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan, sarana penunjang pendidikan dan tenaga kependidikan.
3. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu.
4. Meningkatkan ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum.
5. Pembinaan olah raga, kepemudaan, paguyuban, organisasi kemasyarakatan, agama, etnis dan kebudayaan.
6. Meningkatkan implementasi norma – norma budaya dan religius dalam kehidupan bermasyarakat.

### **3.3 Telaah Renstra K/L dan Renstra Provinsi**

Untuk Kementrian/Lembaga yang mengusung Program KB adalah BKKBN Pusat, dapat dilihat Visi BKKBN Pusat. Visi BKKBN Pusat adalah : **“Menjadi Lembaga Yang Handal dan Dipercaya dalam Mewujudkan Penduduk Tumbuh Seimbang dan Keluarga Berkualitas”**

Dengan Misi BKKBN Pusat sebagai berikut:

1. Mengendalikan pertumbuhan penduduk dalam rangka menjaga kualitas dan struktur penduduk seimbang;
2. Menyelenggarakan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi secara komprehensif;
3. Menyelenggarakan pembangunan keluarga yang holistik integratif sesuai siklus hidup;
4. Membangun kemitraan, jejaring kerja, peran serta masyarakat dan kerjasama global;
5. Memperkuat inovasi, teknologi, informasi dan komunikasi;
6. Membangun kelembagaan, meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan SDM aparatur.

Dapat dilihat sasaran jangka menengah Renstra K/L BKKBN Pusat sebagai berikut:

1. Menurunnya Angka Kelahiran/Total Fertility Rate (TFR) dapat mencapai 2,26 pada tahun 2020 dan ditargetkan menjadi 2,1 pada tahun 2024.
2. Meningkatnya Angka Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR) 61,78 persen pada tahun 2020 ditargetkan menjadi 63,41 persen pada tahun 2024.
3. Menurunnya kebutuhan ber - KB yang tidak terpenuhi/Unmetneed 8,6 persen pada tahun 2020 ditargetkan menjadi 7,4 persen pada tahun 2024.
4. Menurunnya Angka Kelahiran menurut Kelompok Umur 15 -19 tahun/Age Spesific Fertilty Ratio (ASFR) 15 – 19 tahun, dengan target 25 per 1.000 kelahiran pada tahun 2020 dan ditargetnya menjadi 18 per 1.000 kelahiran pada tahun 2024.
5. Meningkatnya Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) sebesar 53,57 persen pada tahun 2020 ditargetkan menjadi 61,00 persen tahun 2024.

Untuk BKKBN Provinsi dengan Visi “**Mewujudkan keluarga berkualitas dan pertumbuhan penduduk yang seimbang guna mendukung tercapainya Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong**”, dan mempunyai Misi:

1. Mengendalikan pertumbuhan penduduk dalam rangka menjaga kualitas dan struktur penduduk seimbang;
2. Menyelenggarakan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi secara komprehensif;
3. Menyelenggarakan pembangunan keluarga yang holistik integratif sesuai siklus hidup;

4. Membangun kemitraan, jejaring kerja, peran serta masyarakat dan kerjasama global;
5. Memperkuat inovasi, teknologi, informasi dan komunikasi;
6. Membangun kelembagaan, meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan SDM aparatur.

**Tabel 3.2.**

**Sasaran jangka Menengah DPPKB Kota Binjai**

Sasaran Program		TARGET KINERJA						
		Base Line	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun	2,19	2,19	2,19	2,17	2,16	2,15	2,1
2	Angka prevalensi kontrasepsi modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	68,2	68,3	69,51	70,1	70,64	71,82	71,82
3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need)	14	13	12	11	10	10	9,5
4	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	23	20	18	16	16	15	15
5	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	55,00	55,00	57,00	59,00	61,00	61,00	61,00
6	Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) Umur 25-49 Tahun	22	22	22,0	22,1	22,1	22,5	22,5

Dari Tabel diatas dapat dilihat bahwa faktor pendorong Capaian Kinerja DPPKB jika dilihat dari Sasaran Jangka menengah BKKBN Pusat dan BKKBN Provinsi adalah:

1. Sudah tercapainya target untuk kota Binjai untuk pencapaian kenaikan persentase CPR

2. Sudah tercapainya target untuk kota Binjai untuk penurunan persentase TFR
3. Sudah tercapainya target usia kawin pertama bagi wanita di Kota Binjai yang rata-rata usia 21 thn

Dalam hal ini tidak ada faktor Penghambat jika dihubungkan dengan sasaran jangka Menengah K/L maupun dengan Provinsi, dan dianggap Kota Binjai telah berhasil dalam program Bangsa Kencana.

### **3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Berdasarkan telaah rencana Tata Ruang dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang ada pada RPJMD Kota Binjai 2021-2026 masalah Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan masalah yang sangat mempengaruhi rencana dan kajian tersebut, yang mana bila pertumbuhan penduduk tidak dapat dikendalikan maka banyak permasalahan yang timbul antara lain masalah hunian yang padat, perekonomian yang tidak berkembang /kurang nya kesejahteraan penduduk sehingga rencana tata ruang wilayah akan sangat sulit untuk dilaksanakan dengan baik .

Lalu masalah kesehatan masyarakat terutama ibu dan anak akibat kelahiran yang tidak terencana menjadikan kajian lingkungan hidup yang tidak baik/ tidak sesuai seperti yang diharapkan.

### **3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis**

Dari adanya tantangan dan peluang yang dihadapi oleh Dinas PPKB Kota Binjai dengan menggunakan metode Analisis SWOT, maka akan dapat ditentukan isu -isu strategis dari Dinas PPKB.

Metode analisis SWOT adalah suatu metode perencanaan strategis untuk mengevaluasi faktor-faktor yang berpengaruh dalam usaha mencapai tujuan, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Pengertian Metode Analisis SWOT diatas yaitu :

#### **1. S (*Strengths*)**

Yaitu Kekuatan, merupakan analisis kekuatan/ sumber daya / keunggulan-keunggulan yang dimiliki Dinas PPKB untuk mencapai target kinerja sesuai dengan Tugas dan fungsinya seperti yang telah dijabarkan dalam RPJMD;

#### **2. W (*Weaknesses*)**

Yaitu Kelemahan, merupakan metode untuk melihat kelemahan/ kekurangan Dinas PPKB dengan membandingkan dengan OPD lain sehingga dapat memperbaiki diri dan lebih meningkatkan kinerja.

3. O (*Opportunities*)

Yaitu Peluang, yang biasanya dilihat diawal perencanaan untuk lebih memaksimalkan target kinerja yang ingin dicapai, baik itu peluang untuk jangka pendek maupun jangka panjang.

4. T (*Threats*)

Yaitu Ancaman, analisis ini merupakan analisis yang sangat penting untuk mendapatkan hasil/ target yang terbaik, karena dengan melihat ancaman yang akan datang, maka Dinas PPKB akan lebih bersiap diri.

Jadi secara umum dengan menggunakan analisis SWOT ini maka setelah melihat hubungan antara Tantangan dan Peluang hingga akhirnya ditemukan isu-isu strategis Dinas PPKB Kota Binjai ,yaitu:

1. Kurangnya dana kegiatan yang mendukung Program Bangga Kencana dan diharapkan agar Ketua TAPD dapat memperhatikan dan mempertimbangkan untuk menambah Pagu Anggaran APBD untuk Dinas PPKB.
2. Kualitas SDM yang belum memadai dan belum sesuai penempatannya atau yang biasa disebut juga *the right man on the right place*.
3. Timbulnya Pandemi wabah Corona (COVID 19) yang ikut menyeret ekonomi dunia pada umumnya dan khususnya Indonesia. Hal ini juga berdampak terhadap anggaran dan kinerja Dinas PP dan KB Kota Binjai.

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah DPPKB**

**Tujuan** merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan Misi dan merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau yang dihasilkan dalam jangka 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) Tahun serta harus konsisten dengan tugas dan fungsinya secara kolektif untuk menggambarkan arah strategik organisasi dan perbaikan - perbaikan yang ingin diciptakan.

Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai Visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu-isu strategis dan semua permasalahan dan pengembangan SKPD.

Tujuan Dinas Pengendalian Penduduk dan KB yang utama adalah:

1. Pembinaan dan Pelayanan KB Kepada Masyarakat untuk meningkatkan keluarga berkualitas;
2. Mengendalikan Pertumbuhan Penduduk dengan program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga dan Keluarga Berencana);
3. Penduduk tumbang seimbang.

Tujuan ini sesuai dengan Misi Ketiga dari RPJMD yaitu :

Misi 3 : **Mewujudkan Sumber Daya Manusia dan Masyarakat Kota Binjai yang Berkualitas.**

**Sasaran** merupakan penjabaran secara detail atau implementasi dari tujuan merupakan target yang akan dicapai atau yang dihasilkan dalam jangka 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) Tahun dan selaras dengan tugas pokok dan fungsi. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai dan rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan.

Adapun yang menjadi Sasaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adaah :

1. Menurunnya Laju Pertumbuhan Penduduk;
2. Tersedianya Sarana dan Prasarana yang memadai untuk Pelayanan Keluarga Berencana Meningkatkan mutu pelayanan dalam program KB;
3. Meningkatnya Angka Pemakaian Kontrasepsi;
4. Menurunkan TFR (Total Fertility Rate) atau menurunkan persentase rata-rata jumlah total anak yang dilahirkan diusia subur;

5. Menurunnya Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) yang tidak ingin anak tapi tidak ber KB;
6. Meningkatnya jumlah anggota Kelompok BKB, BKR ,BKI dan UPPKS yang ber KB;
7. Terlaksananya Pembinaan Program KKPBK kepada kelompok- kelompok kegiatan (POKTAN) yang ada di Masyarakat;
8. Pembinaan dan Konseling bagi Calon Pengantin (CaTin);
9. Menurunnya angka kelahiran remaja perempuan usia 15-19.

Pada tabel 4.1 di bawah ini dapat kita lihat tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas PPKB Kota Binjai

**Tabel 4.1**  
**Tujuan Dan Sasaran Renstra DPPKB**

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN		TARGET KINERJA PADA TAHUN KE						
	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana kepada Masyarakat	Menurunnya Laju Pertumbuhan Penduduk	Persentase LPP (Laju Pertumbuhan Penduduk)	1,07	1,07	1,06	1,06	1,06	1,05	1,05
	Tersedianya Sarana dan Prasarana yang memadai untuk Pelayanan Keluarga Berencana	Jumlah Faskes dan Jejaring yang bekerjasama dengan BPJS dalam melayani pemasangan kontrasepsi dan terintegrasi dengan DPPKB Kota Binjai	38 faskes	42 faskes	41 faskes				
	Meningkatnya Angka Pemakaian Kontrasepsi	Persentase CPR	68,15	68,15	68,3	69,51	70,1	70,64	71,82
	Menurunkan TFR (Total Fertility Rate) atau menurunkan persentase rata-rata jumlah total anak yang dilahirkan diusia subur;	Persentase TFR	2,19	2,19	2,19	2,16	2,16	2,1	2,1
	Menurunnya Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) yang tidak ingin anak tapi tidak ber KB	Persentase PUS Unmetneed	14	13	12	11	10	10	9,5
	Meningkatnya jumlah anggota Kelompok BKB, BKR ,BKI dan UPPKS yang ber KB	Jumlah anggota BKB,BKR,BKL dan UPPKS yang ber KB :	6228 org	6228 org	6428 org	6528 org	6628 org	6728 org	6828 org
Mengendalikan Pertumbuhan Penduduk dengan Program KKBPK (	Terlaksananya Pembinaan Program KKPBK kepada kelompok- kelompok kegiatan (POKTAN) yang ada di Masyarakat;	Jumlah Kelompok PIK-R :	66 klpk	66 klpk	86 klpk	96 klpk	106 klpk	116 klpk	126 klpk
		Jumlah Kelompok BKB :	71 klpk	71klpk	91klpk	101klpk	111klpk	121klpk	131klpk

Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga )		Jumlah Kelompok BKR :	53 klpk	53 klpk	73 klpk	83 klpk	93 klpk	103 klpk	113 klpk
		Jumlah Kelompok BKL :	55 klpk	55 klpk	75 klpk	85 klpk	95 klpk	105 klpk	115 klpk
		Jumlah Kelompok UPPKS :	42 klpk	42 klpk	62 klpk	72 klpk	82 klpk	92 klpk	102 klpk
	Pembinaan dan Konseling bagi Calon Pengantin (CaTin)	Usia Kawin Pertama (UKP) bagi wanita (tahun)	22	22	22	22,1	22,1	22,5	22,5
	Menurunnya angka kelahiran remaja perempuan usia 15-19	Jumlah Kelahiran Remaja Perempuan per 1000 perempuan usia 15 -19 tahun	23	20	18	16	16	15	15

## **4.2 Hubungan Tujuan dan Sasaran DPPKB dengan Tujuan dan Sasaran RPJMD**

Dalam RPJMD Kota Binjai Tahun 2021-2026 Bab 5 yang isinya mengenai Tujuan RPJMD Kota Binjai, dapat dilihat hubungan atau kesesuaian antara tujuan dan sasaran RPJMD Kota Binjai dengan Tujuan dan sasaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Binjai, khususnya Misi 3 yaitu :

**Misi 3 : “Mewujudkan Sumber Daya Manusia dan Masyarakat Kota Binjai yang Berkualitas”.**

Dengan tujuan :

1. Meningkatkan akses, cakupan dan kualitas/mutu pendidikan dan pelayanan kesehatan dasar yang memenuhi standar;
2. Menjaga kerukunan dan kondusifitas daerah;
3. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kota Binjai;
4. Menggairahkan kembali nilai-nilai kebudayaan daerah sebagai ciri khas Kota Binjai dengan masyarakatnya yang beraneka ragam.

Dengan Sasaran :

1. Meningkatnya akses dan kualitas layanan pendidikan;
2. Meningkatnya akses dan kualitas layanan kesehatan;
3. Meningkatnya harmonisasi dan kerukunan antar masyarakat;
4. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat;
5. Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan.

Hubungan antara Tujuan dan Sasaran DPPKB dengan Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Binjai dapat dilihat pada Tabel 4.2 berikut ini:

**Tabel 4.2**

**Hubungan Antara Tujuan Dan Sasaran Renstra Dinas PPKB Dengan Tujuan Dan Sasaran RPJMD Kota Binjai**

MISI 3 RPJMD : "Mewujudkan Sumber Daya Manusia dan Masyarakat Kota Binjai yang Berkualitas"					KONDISI AWAL 2020	TARGET CAPAIAN PADA TAHUN KE						INDIKATOR SASARAN DINAS PPKB	KONDISI AWAL 2020	TARGET CAPAIAN PADA TAHUN KE									
TUJUAN RPJMD	TUJUAN DPPKB	SASARAN RPJMD	SASARAN DPPKB	INDIKATOR SASARAN RPJMD		2021		2022	2023	2024	2025			2026	2021		2022	2023	2024	2025	2026		
						Target	Realisasi								Target	Realisasi							
Meningkatkan akses, cakupan dan kualitas/mutu pendidikan dan pelayanan kesehatan dasar yang memenuhi standar	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana kepada Masyarakat	Meningkatnya akses dan kualitas layanan pendidikan	Menurunnya Laju Pertumbuhan Penduduk	1	Rata-rata Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) (%)	1,07	1,07	1,07	1,06	1,06	1,06	1,05	1,05	1	Perseentase LPP (Laju Pertumbuhan Penduduk)	1,07	1,07	1,07	1,06	1,06	1,06	1,05	1,05
Menjaga kerukunan dan kondusifitas daerah		Meningkatnya akses dan kualitas layanan kesehatan	Tersedianya Sarana dan Prasarana yang memadai untuk Pelayanan Keluarga Berencana	2	Rasio Akseptor KB (CPR) (%)	68,2	68,3	68,3	69,51	70,1	70,64	71,82	71,82	2	Perseentase Faskes dan Jejaring yang bekerjasama dengan BPJS dalam melayani pemangsaan kontrasepsi dan terintegrasi dengan DPPKB Kota	38 faskes	42 faskes	41 faskes					

														Binjai									
Meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kota Binjai		Meningkatnya harmonisasi dan kerukunan antar masyarakat	Meningkatnya angka pemakaian kontrasepsi	3	Angka Kelahiran Total (TFR) (%)	2,19	2,19	2,19	2,19	2,17	2,16	2,15	2,1	3	Perseentase CPR	68,2	68,3	68,3	69,51	70,1	70,64	71,82	71,82
Menggairahkan kembali nilai – nilai kebudayaan daerah sebagai ciri khas Kota Binjai dengan masyarakatnya yang beraneka ragam		Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	Menurunkan TFR (Total Fertility Rate) atau menurunkan persentase rata-rata jumlah total anak yang dilahirkan diusia subur;											4	Perseentase TFR	2,19	2,19	2,19	2,19	2,17	2,16	2,15	2,1
		Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan	Menurunkan Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) yang tidak ingin anak tapi tidak ber KB											5	Perseentase PUS Unmetneed	14	13	13	12	11	10	10	9,5
			Meningkatnya jumlah anggota Kelompok BKB, BKR, BKI dan UPPKS yang ber KB											6	Jumlah Kelompok BKB, BKR, BKI dan UPPKS yang ber KB :	6228 org	6228 org	6228 org	6428 org	6528 org	6628 org	6728 org	6828 org
	Mengendalikan Pertumbuhan Penduduk dengan Program KKBPK (		Terlaksananya Pembinaan Program KKBPK kepada kelompok-											1	Jumlah Kelompok PIK-R :	66 klpk	66 klpk	66 klpk	86 klpk	96 klpk	106 klpk	116 klpk	126 klpk



## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

#### **5.1 Strategi dan Arah Kebijakan SKPD**

Strategi merupakan dasar dalam menjabarkan berbagai program prioritas guna mewujudkan sasaran. Dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, disusunlah strategi dan kebijakan sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan.

Strategi juga merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana cara mencapai tujuan dan sasaran 5 (lima) tahun kedepan dengan efektif dan efisien dengan berpedoman kepada RPJMD.

Kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun. Sedangkan Arah Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran.

Strategi dan arah kebijakan dalam Renstra DPPKB adalah strategi dan kebijakan DPPKB untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam Rancangan Awal RPJMD.

Strategi dan kebijakan dalam Renstra DPPKB selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan DPPKB bagi setiap program prioritas.

Strategi dan Kebijakan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang telah disesuaikan dengan RPJMD Kota Binjai dapat dilihat pada tabel 5.1

**Tabel 5.1**  
**Strategi, Arah Kebijakan Dan Program / Kegiatan**

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA		CAPAIAN KINERJA		PROGRAM	KEGIATAN
						KONDISI AWAL (2020)	KONDISI AKHIR (2026)		
Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana kepada Masyarakat	Menurunnya Laju Pertumbuhan Penduduk	Melaksanakan Grand Design Pembangunan Kependudukan Kota Binjai	Menyusun Draft Peraturan Tentang Kependudukan pada Grand Design Pembangunan Kependudukan Kota Binjai	1.	Persentase LPP (Laju Pertumbuhan Penduduk)	1 bh Perwa	1 bh Perwa	Keluarga Berencana	
	Tersedianya Sarana dan Prasarana yang memadai untuk Pelayanan Keluarga Berencana	Perencanaan Pengnadaan Sarana dan Prasarana Pelayanan KB pada penyusunan Renja Tahunan DPPKB	Menyediakan Alokon di tiap Faskes terutama untuk ibu yang habis melahirkan	2.	Persentase Faskes dan Jejaring yang bekerjasama dengan BPJS dalam melayani pemasangan kontrasepsi dan terintegrasi dengan DPPKB Kota Binjai	38 faskes	41 faskes	Pembinaan Peran Serta masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang mandiri	Operasional Distribusi Alokon
	Meningkatnya Angka Pemakaian Kontrasepsi	Mengadakan Sosialisasi Program KB	Menyediakan Narasumber yang Ahli di bidang Alokon Modern pada kegiatan Sosialisasi	3.	Persentase CPR	68,15	71,82	Pelayanan Kontrasepsi	Orientasi tentang Alokon Modern
	Menurunkan TFR (Total Fertility Rate) atau menurunkan persentase rata-rata jumlah total anak yang dilahirkan diusia subur;	Mengadakan Sosialisasi Program KB	Menyediakan Narasumber yang Ahli di bidang Alokon Modern pada kegiatan Sosialisasi	4.	Persentase TFR	2,19	2,1	Pelayanan Kontrasepsi	Orientasi tentang Alokon Modern
	Menurunnya Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) yang tidak ingin anak tapi tidak ber KB	Mengadakan Sosialisasi tentang Unmetneed	menetapkan target PUS Unmetneed yang wajib turun tiap tahun	5.	Persentase PUS Unmetneed	14	9,5	Pelayanan Kontrasepsi	Sosialisasi Unmetneed

	Meningkatnya jumlah anggota Kelompok BKB, BKR, BKL dan UPPKS yang ber KB	Melaksanakan Pembinaan POKTAN	Menyediakan Narasumber yang Ahli di bidang KKBPk( Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembinaan Keluarga) pada kegiatan Sosialisasi	6.	Jumlah anggota BKB,BKR,BKL dan UPPKS yang ber KB :	6228 org	6828 org	Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga	Orientasi BKB, BKR dan BKL serta UPPKS
Mengendalikan Pertumbuhan Penduduk dengan Program KKBPk ( Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga )	Terlaksananya Pembinaan Program KKPBK kepada kelompok- kelompok kegiatan (POKTAN) yang ada di Masyarakat;	Melaksanakan Pembinaan POKTAN	Mengusulkan dana Operasional untuk Kader POKTAN di Lapangan	7.	Jumlah Kelompok PIK-R :	66 klpk	126 klpk	Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga	Operasional Kader Tribina dan UPPKS
				8.	Jumlah Kelompok BKB :	71 klpk	131klpk		
				9.	Jumlah Kelompok BKR :	53 klpk	113 klpk		
				10.	Jumlah Kelompok BKL :	55 klpk	115 klpk		
				11.	Jumlah Kelompok UPPKS :	42 klpk	102 klpk		
	Pembinaan dan Konseling bagi Calon Pengantin (CaTin)	Meningkatkan pelayanan KB kepada Calon Pengantin (CaTin) /PUS (Pasangan Usia Subur)	Pelaksanaan Sosialisasi bagi PUS/ Catin	12.	Usia Kawin Pertama (UKP) bagi wanita (tahun)	22	22,5	Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri	PPKS (Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera)
	Menurunnya angka kelahiran remaja perempuan usia 15-19	Mengadakan Sosialisasi/ pembinaan oleh kader kepada masyarakat tentang bahaya kawin dibawah umur	Menetapkan peraturan tentang syarat menikah/ pembinaan calon Pengantin	13.	Angka Kelahiran Remaja Perempuan per 1000 perempuan usia 15 -19 tahun	23	15		

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN**

#### **6.1 Rencana Program dan Kegiatan SKPD**

Sebagai Perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan dan sasaran strategi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, maka langkah operasionalnya harus dituangkan kedalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana semua program di tiap SKPD sudah ditetapkan dalam suatu system yang disebut SIMDA yang mana isinya sesuai dengan RPJMD.

Program dari Dinas PPKB yang ada antara lain:

1. Program Urusan Penunjang Pemerintah
2. Program Pengendalian Penduduk
3. Program Keluarga Berencana
4. Program Ketahanan Kesejahteraan Keluarga

Setelah keluarnya Tupoksi baru Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sesuai Peraturan Wali Kota Binjai Nomor 37 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Binjai, dan dengan melakukan telaah pada program Kementerian dan Lembaga serta Provinsi, maka ditambahkan lagi satu program/kegiatan yang berhubungan dengan pengendalian penduduk yang menjadi program ke 11. Yaitu:

#### **Program Pengendalian Penduduk**

Diharapkan dengan program baru ini nanti dapat lebih memaksimalkan kinerja DPPKB kedepannya.

Program pada DPPKB merupakan program RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi DPPKB. Rencana Program Prioritas beserta indikator kinerja program dan Pagu DPPKB dalam Rancangan Awal RPJMD selanjutnya dijabarkan Dinas PPKB ke dalam Rencana Kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut.

Pemilihan Kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah DPPKB. Indikator Kinerja Program Prioritas yang telah ditetapkan tersebut, merupakan indikator kinerja program yang pada prinsipnya berisi outcome program. *Outcome* merupakan hasil yang diperoleh dalam jangka menengah yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.

## **6.2 Langkah- langkah Perumusan Rencana Program dan Kegiatan**

Langkah-langkah yang harus diambil untuk merumuskan Rencana Program dan Kegiatan antara lain :

- a. Menyesuaikan indikator program dan pagu Anggaran untuk 1 Tahun;
- b. Merumuskan target *outcome* program untuk mencapai sasaran pembangunan;
- c. Melakukan perumusan target output (keluaran) yang akan dihasilkan melalui kegiatan-kegiatan dalam rangka mencapai target *outcome* program Dinas PPKB;
- d. Merumuskan kegiatan dengan menghitung biaya kegiatan dan total biaya per program;
- e. Menyusun rincian target *outcome* program ke dalam target tahunan, lalu kemudian disusunlah perkiraan kebutuhan anggaran pembiayaan program pertahun.

Rencana Program dan kegiatan DPPKB dapat dilihat pada tabel 6.1 di bawah ini:

**Tabel 6.1**

**Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kota Binjai**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan														(20)
					Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Priode Renstra Perangkat Daerah		
					Target	Rp	Target	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targe t	Rp	Target	Rp	
			Indikator Kinerja Tujuan,Sa saran,Program,(Outco me) dan Kegiatan (Output)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
Tujuan : Menjaga Kerukunan dan Kondusifitas Daerah			Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk		1,07		1,06		1,06		1,06		1,05		1,05		1,05		
			Total Fertility Rate (TFR)		2,21		2,21		2,16		2,16		2,1		2,1		2,1		
Sasaran : Meningkatnya Harmonisasi dan Kerukunan Antar Masyarakat			Rasio Ketergantungan Penduduk		47		47		47		45		45		45		45		
			Persentase Jumlah Akseptor KB Aktif (MCPR)		68,15		68,3		69,51		70,1		70,64		71,82		71,82		
			Persentase kebutuhan ber - KB yang tidak terpenuhi (unmet need)		9,05		8,6		8,4		7,3		7,1		7		7		
			Angka Kelahiran Remaja umur 15-		23		20		18		16		16		15		15		

			19 Tahun (ASFR)														
			Rata - rata usia kawin pertama wanita		22		22		22,1		22,1		22,5		22,5		22,5
			Indeks Pembangunan Keluarga (IPK)		55,00		57,00		59,00		61,00		61,00		61,00		61,00
			Angka Stunting		2,4		2		1,8		1,5		1		0		0
	2.14.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KOTA BINJAI</b>	<b>Cakupan program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota</b>	%	100	6.423.867.947	8.062.000.000	8.384.448.000	8.719.737.600	9.068.954.000	9.465.408.000	43.700.547.600					
	2.14.01.2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>				14.950.200	16.100.000	16.712.000	17.340.000	18.044.000	18.760.000	86.956.000					
	2.14.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen yang disusun	Dokumen	3	9.613.700	3 10.300.000	3 10.712.000	3 11.100.000	3 11.544.000	3 12.000.000	15 55.656.000					
	2.14.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen yang disusun	Dokumen	1	5.336.500	1 5.800.000	1 6.000.000	1 6.240.000	1 6.500.000	1 6.760.000	5 31.300.000					
	2.14.01.2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>				4.987.371.631	5.256.000.000	5.466.240.000	5.684.889.600	5.912.256.400	6.182.468.000	28.501.854.000					
	2.14.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji dan tunjangan yang	Orang	35	4.848.370.031	35 5.100.000.000	36 5.304.000.000	37 5.516.160.000	38 5.736.806.400	39 6.000.000.000	185 27.656.966.400					

			dibayarkan															
2.14.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanan Akuntansi SKPD	Jumlah pengelola keuangan	Tahun	1	133.350.000	1	150.000.000	1	156.000.000	1	162.240.000	1	168.700.000	1	175.448.000	5	812.388.000	
2.14.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen yang disusun	dokumen	1	5.651.600	1	6.000.000	1	6.240.000	1	6.489.600	1	6.750.000	1	7.020.000	5	32.499.600	
2.14.01.2.05	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		%		<b>7.130.000</b>		<b>295.000.000</b>		<b>306.800.000</b>		<b>319.072.000</b>		<b>332.000.000</b>		<b>345.280.000</b>		<b>1.598.152.000</b>	
2.14.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Sarana dan Prasarana	Tahun	0	0	1	100.000.000	1	104.000.000	1	108.160.000	1	112.500.000	1	117.000.000	5	541.660.000	
2.14.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pegawai	orang	0	0	100	80.000.000	100	83.200.000	100	86.528.000	100	90.000.000	100	93.600.000	500	433.328.000	
2.14.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti diklat	orang	1	7.130.000	2	15.000.000	2	15.600.000	2	16.224.000	2	17.000.000	2	17.680.000	10	81.504.000	
2.14.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Pegawai yang ikut bimtek	orang	0	0	10	100.000.000	10	104.000.000	10	108.160.000	10	112.500.000	10	117.000.000	50	541.660.000	
2.14.01.2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>				<b>220.753.200</b>		<b>645.000.000</b>		<b>670.800.000</b>		<b>697.632.000</b>		<b>727.100.000</b>		<b>756.184.000</b>		<b>3.496.716.000</b>	
2.14.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	Jumlah Komponen Instalasi Listrik	tahun	0	0	1	50.000.000	1	52.000.000	1	54.080.000	1	56.000.000	1	58.240.000	5	270.320.000	

		Kantor																	
2.14.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan	tahun	0	0	1	150.000.000	1	156.000.000	1	162.240.000	1	168.700.000	1	175.448.000	5	812.388.000		
2.14.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan tersedia	tahun	0	0	1	50.000.000	1	52.000.000	1	54.080.000	1	56.200.000	1	58.448.000	5	270.728.000		
2.14.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Logistik Kantor	tahun	1	85.747.600	1	120.000.000	1	124.800.000	1	129.792.000	1	135.000.000	1	140.400.000	5	649.992.000		
2.14.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah barang cetakan dan pengandaan	Tahun	1	31.793.600	1	35.000.000	1	36.400.000	1	37.856.000	1	40.000.000	1	41.600.000	5	190.856.000		
2.14.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah tamu	orang	0	0	20	30.000.000	20	31.200.000	20	32.448.000	25	35.000.000	25	36.400.000	110	165.048.000		
2.14.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah SPPD	Orang	15	103.212.000	20	200.000.000	25	208.000.000	25	216.320.000	25	225.000.000	25	234.000.000	120	1.083.320.000		
2.14.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	Jumlah Arsip	tahun	1	0	1	10.000.000	1	10.400.000	1	10.816.000	1	11.200.000	1	11.648.000	5	54.064.000		
2.14.01.2.07.02	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>						<b>230.000.000</b>		<b>1.000.000.000</b>		<b>1.040.000.000</b>		<b>1.081.600.000</b>		<b>1.123.700.000</b>		<b>1.168.648.000</b>		<b>5.413.948.000</b>
2.14.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Dinas Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang dibutuhkan	tahun	0	0	1	700.000.000	1	728.000.000	1	757.120.000	1	787.500.000	1	819.000.000	5	3.791.620.000		
2.14.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah kendaraan operasional/lapangan	tahun	1	200.000.000	1	210.000.000	1	218.400.000	1	227.136.000	1	235.000.000	1	244.400.000	5	1.134.936.000		

		atau Lapangan	yang dibutuhkan																
2.14.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang dibutuhkan	tahun	1	30.000.000	1	40.000.000	1	41.600.000	1	43.264.000	1	45.000.000	1	46.800.000	5	216.664.000		
2.14.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan yang dibutuhkan	tahun	0		0	50.000.000	1	52.000.000	1	54.080.000	1	56.200.000	1	58.448.000	5	270.728.000		
2.14.01.2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>						<b>253.287.116</b>		<b>340.000.000</b>		<b>353.600.000</b>		<b>367.744.000</b>		<b>382.416.000</b>		<b>397.648.000</b>		<b>1.841.408.000</b>
2.14.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	tahun	1	69.919.716	1	90.000.000	1	93.600.000	1	97.344.000	1	101.200.000	1	105.248.000	5	487.392.000		
2.14.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	tahun	1	183.367.400	1	250.000.000	1	260.000.000	1	270.400.000	1	281.216.000	1	292.400.000	5	1.354.016.000		
2.14.01.2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>						<b>710.375.800</b>		<b>509.900.000</b>		<b>530.296.000</b>		<b>551.460.000</b>		<b>573.437.600</b>		<b>596.420.000</b>		<b>2.761.513.600</b>
2.14.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas Jabatan	unit	1	59.534.000	11	150.000.000	11	156.000.000	11	162.240.000	11	168.729.600	11	175.500.000	55	812.469.600		

	2.14.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pemeliharaan an Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	unit	56													
						209.974.800	56	225.000.000	56	234.000.000	56	243.360.000	56	253.000.000	56	263.120.000	280	1.218.480.000
	2.14.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan an Peralatan dan Mesin lainnya	Tahun	1	33.230.000	1	34.900.000	1	36.296.000	1	37.700.000	1	39.208.000	1	40.800.000	5	188.904.000
	2.14.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan an Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tahun	1	407.637.000	1	100.000.000	1	104.000.000	1	108.160.000	1	112.500.000	1	117.000.000	5	541.660.000
	02.14.02	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK</b>				<b>208.297.900</b>		<b>755.000.000</b>		<b>785.200.000</b>		<b>816.608.000</b>		<b>848.600.000</b>		<b>882.544.000</b>		<b>4.087.952.000</b>
			Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk			1,07		1,06		1,06		1,06		1,05		1,05		1,05
			Total Fertility Rate (TFR)			2,21		2,21		2,16		2,16		2,1		2,1		2,1
			Rasio Ketergantungan Penduduk			47		47		47		45		45		45		45
	02.04.02.2.01	<b>Pemanduan dan Singkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Pengendalian</b>				<b>15.959.500</b>		<b>290.000.000</b>		<b>301.600.000</b>		<b>313.664.000</b>		<b>325.800.000</b>		<b>338.832.000</b>		<b>1.569.896.000</b>

		Kuantitas Penduduk																
	2.14.02.2.01.02	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK)	Jumlah OPD yang memanfaatkan GDPK	OPD	0	0	35	35.000.000	35	36.400.000	35	37.856.000	35	39.300.000	35	40.872.000	175	189.428.000
	2.14.02.2.01.05	Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	Jumlah MOU	Dokumen	0	0	3	30.000.000	3	31.200.000	3	32.448.000	3	33.700.000	3	35.048.000	15	162.396.000
	2.14.02.2.01.06	Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal	Jumlah MOU	Dokumen	0	0	3	30.000.000	3	31.200.000	3	32.448.000	3	33.700.000	3	35.048.000	15	162.396.000
	2.14.02.2.01.07	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten /kota	Jumlah Sekolah Siaga Kependudukan	sekolah	3	15.959.500	3	30.000.000	3	31.200.000	3	32.448.000	3	33.700.000	3	35.048.000	15	162.396.000
	2.14.02.2.01.09	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jejang SD/MI dan	Jumlah sosialisasi	Kegiatan	0	0	2	50.000.000	2	52.000.000	2	54.080.000	2	56.200.000	2	58.448.000	10	270.728.000

		SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal																
2.14.02.2.01.10		Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal	Jumlah Sekolah Siaga Kependudukan	sekolah	0	0	3	50.000.000	3	52.000.000	3	54.080.000	3	56.200.000	3	58.448.000	15	270.728.000
2.14.02.2.01.11		Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan	Jumlah Kelompok	Kelompok	0	0	2	35.000.000	2	36.400.000	2	37.856.000	2	39.300.000	2	40.872.000	10	189.428.000
2.14.02.2.01.14		Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	Jumlah Sarasehan	Kegiatan	0	0	1	30.000.000	1	31.200.000	1	32.448.000	1	33.700.000	1	35.048.000	5	162.396.000
2.14.02.2.02		<b>Pemetakan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>																
2.14.02.2.02.03		Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Jumlah Profil Kependudukan	buku	0	0	60	35.000.000	60	36.400.000	60	37.856.000	60	39.300.000	60	40.872.000	300	189.428.000
2.14.02.2.02.05		Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan	Jumlah Kajian	Dokumen	0	0	5	50.000.000	5	52.000.000	5	54.080.000	5	56.200.000	5	58.448.000	25	270.728.000

2.14.02.2.02.08	Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain	Jumlah rumah data kependudukan di kampung KB	unit	0	0	5	50.000.000	5	52.000.000	5	54.080.000	5	56.200.000	5	58.448.000	25	270.728.000
2.14.02.2.02.09	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah sistem informasi keluarga	aplikasi	0	0	5	50.000.000	5	52.000.000	5	54.080.000	5	56.200.000	5	58.448.000	25	270.728.000
2.14.02.2.02.10	Pemanfaatan Data Hasil Pemuktahiran Data Keluarga	Jumlah Dokumen Data Hasil Pendataan Keluarga	Dokumen	0	0	40	30.000.000	40	31.200.000	40	32.448.000	40	33.700.000	40	35.048.000	200	162.396.000
2.14.02.2.02.11	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Buku analisis dan evaluasi serta Data Basis Program KB	Buku	60	43.917.100	60	50.000.000	60	52.000.000	60	54.080.000	60	56.200.000	60	58.448.000	300	270.728.000
2.14.02.2.02.13	Pengelolaan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Buku Umpan Balik PB dan PA	buku	720	148.421.300	720	180.000.000	720	187.200.000	720	194.688.000	720	202.500.000	720	210.600.000	3600	974.988.000
2.14.02.2.02.14	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK	Jumlah Monitoring dan evaluasi	Kelurahan	0	0	37	20.000.000	37	20.800.000	37	21.632.000	37	22.500.000	37	23.400.000	185	108.332.000
2.14.03	<b>PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)</b>				<b>1.574.295.450</b>		<b>2.267.000.000</b>		<b>2.357.680.000</b>		<b>2.452.372.000</b>		<b>2.547.981.600</b>		<b>2.632.392.800</b>		<b>12.257.426.400</b>
		Persentase Jumlah Akseptor KB Aktif	persen	68,15		68,3		69,51		70,1		70,64		71,82		71,82	

			Persentase kebutuhan ber - KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	persen	9,05		8,6		8,4		7,3		7,1		7		7	
			Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 Tahun (ASFR)	ratio	23		20		18		16		16		15		15	
	2.14.03.2.01	<b>Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Dengan Kearifan Budaya Lokal</b>																
	2.14.03.2.01.01	Advokasi Program KKBPK Kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Mitra Kerja yang bekerjasama	OPD	0	0	30	30.000.000	30	31.200.000	30	32.448.000	30	45.000.000	30	46.800.000	150	185.448.000
	2.14.03.2.01.03	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	Jumlah Media KIE dan Manajemen BOKB (DAK BOKB)	Kegiatan	5	132.533.000	5	150.000.000	5	156.000.000	5	162.240.000	5	168.729.600	5	175.500.000	25	812.469.600
	2.14.03.2.01.04	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Mssa Cetak dan Electronik Serta Media Luar Ruang	Jumlah Pemutaran film KB	Kelurahan	37	27.995.450	37	40.000.000	37	41.600.000	37	43.264.000	37	45.000.000	37	46.800.000	185	216.664.000
	2.14.03.2.01.07	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Kecamatan (DAK BOKB)	Jumlah Operasional Balai Penyuluhan KB Kecamatan (DAK BOKB)	tahun	1	370.500.000	1	400.000.000	1	416.000.000	1	432.640.000	1	450.000.000	1	468.000.000	5	2.166.640.000

	2.14.03.2.02	<b>Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)</b>					177.600.000		262.000.000		272.480.000		283.764.000		295.120.000		306.924.800		1.420.288.800	
	2.14.032.02.01	Pembinaan IMP dan Program KKBP di Lini Lapangan Oleh PKB/PLKB	Jumlah Pembinaan IMP di Kecamatan	Kecamatan	0	0	5	40.000.000	5	41.600.000	5	43.264.000	5	45.000.000	5	46.800.000	25		216.664.000	
	2.14.032.02.04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader IMP (DAK BOKB)	Kader	346	0	346	177.600.000	346	230.880.000	346	240.500.000	346	250.120.000	346	260.124.800	1730		1.203.624.800	
	2.14.03.2.03	<b>Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota</b>					608.907.000		975.000.000		1.014.000.000		1.054.560.000		1.094.232.000		1.120.472.000		5.258.264.000	
	2.14.03.2.03.01	Pengendalian Pendistribusian Alat Dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB Ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Faskes Penerima Distribusi Alokon dan Visitasi Registrasi Faskes (DAK BOKB)	Faskes	42	76.482.000	42	100.000.000	42	104.000.000	42	108.160.000	42	110.000.000	42	114.400.000	210		536.560.000	
	2.14.03.2.03.02	Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah petugas kompeten pencatat dan pelaporan alokon	Kegiatan	0	0	1	40.000.000	1	41.600.000	1	43.264.000	1	45.000.000	1	46.800.000	5		216.664.000	

2.14.03.2.03.03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Kasus Pelayanan di faskes dan MOW serta IUD Implan (DAK BOKB)	kasus	1	282.529.000	1	300.000.000	1	312.000.000	1	324.480.000	1	337.459.200	1	351.000.000	5	1.624.939.200
2.14.03.2.03.04	Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Jumlah Kasus kegagalan penggunaan MKJP yang menerima Kompensasi	Kasus	0	0	10	50.000.000	10	52.000.000	10	54.080.000	10	56.200.000	10	58.448.000	50	270.728.000
2.14.03.2.03.05	Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Rencana distribusi alokon	dokumen	0	0	42	25.000.000	42	26.000.000	42	27.040.000	42	28.100.000	42	29.224.000	210	135.364.000
2.14.03.2.03.06	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah sarana penunjang pelayanan KB (DAK)	Tahun	1	184.800.000	1	200.000.000	1	208.000.000	1	216.320.000	1	224.972.800	1	234.000.000	5	1.083.292.800
2.14.03.2.03.07	Pembinaan Pasca Pelayanan Bagi Peserta Baru	Jumlah Pembinaan peserta baru	Kegiatan	0	0	1	60.000.000	1	62.400.000	1	64.896.000	1	67.500.000	1	70.200.000	5	324.996.000
2.14.03.2.03.08	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Faskes yang memberikan pelayanan KB	faskes	0	0	42	40.000.000	1	41.600.000	1	43.264.000	1	45.000.000	1	46.800.000	46	216.664.000

2.14.03.2.03.09	Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, Serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Jumlah Kader Konseling Kesehatan Reproduksi	kader	0	0	1	40.000.000	1	41.600.000	1	43.264.000	1	45.000.000	1	46.800.000	5	216.664.000
2.14.03.2.03.10	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Jumlah Petugas pencatat dan pelaporan RR terlatih dan lebih terampil	orang	1	23.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.14.03.2.03.11	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah Pelayanan KB Bergerak Melalui MUYAN Tersedia	tahun	1	27.476.000	1	40.000.000	1	41.600.000	1	43.264.000	1	45.000.000	1	46.800.000	5	216.664.000
2.14.03.2.03.12	Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran	Jumlah Tenaga Konseling KB Pasca Persalinan	orang	0	0	1	40.000.000	1	41.600.000	1	43.264.000	1	45.000.000	1	29.200.000	5	199.064.000
2.14.03.2.03.13	Peningkatan Kesertaan KB Pria	Jumlah Peserta KB Pria (DAK BOKB)	Kasus	13	14.520.000	20	40.000.000	25	41.600.000	30	43.264.000	35	45.000.000	40	46.800.000	150	216.664.000
2.14.03.2.04	<b>Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber KB</b>				<b>256.760.000</b>		<b>440.000.000</b>		<b>457.600.000</b>		<b>475.904.000</b>		<b>494.900.000</b>		<b>514.696.000</b>		<b>2.383.100.000</b>

2.14.03.2.04.01	Penguatan Peran Serta Organisasi Masyarakat dan Mitra Kerja Lainnya Dalam Pelaksanaan Layanan dan Pembinaan Kesertaan Ber KB	Jumlah Mitra kerja dan Organisasi Masyarakat	Kegiatan	0	0	3	90.000.000	3	93.600.000	3	97.344.000	3	101.200.000	3	105.248.000	15	487.392.000
2.14.03.2.04.02	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah OPD yang terlibat di kampung KB	OPD	0	0	10	50.000.000	10	52.000.000	10	54.080.000	10	56.200.000	10	58.448.000	50	270.728.000
2.14.03.2.04.03	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Jumlah Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB (DAK BOKB)	Tahun	0	0	4	300.000.000	4	312.000.000	4	324.480.000	4	337.500.000	4	351.000.000	20	1.624.980.000
2.14.03.2.04.04	Pembinaan Terpadu Kampung KB	Jumlah Pembinaan Kampung KB	Tahun	4	256.760.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.14.04	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)</b>				<b>493.627.800</b>		<b>1.930.000.000</b>		<b>2.007.200.000</b>		<b>2.087.488.000</b>		<b>2.171.648.000</b>		<b>2.258.620.000</b>		<b>10.454.956.000</b>
		Rata - rata usia kawin pertama wanita		22		22		22,1		22,1		22,5		22,5		22,5	
		Indeks Pembangunan Keluarga (IPK)		55,00		57,00		59,00		61,00		61,00		61,00		61,00	
		Angka Stunting		2,4		2		1,8		1,5		1		0		0	

		<b>Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</b>				<b>63.439.800</b>		<b>1.385.000.000</b>		<b>1.440.400.000</b>		<b>1.498.016.000</b>		<b>1.557.948.000</b>		<b>1.620.372.000</b>		<b>7.501.736.000</b>		
	2.14.04.2.01																			
	2.14.042.01.01	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R), Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Jumlah kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Kelompok	0	0	10	80.000.000	10	83.200.000	10	86.528.000	10	90.000.000	10	93.600.000	50	433.328.000		
	2.14.042.01.02	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga /UPPKS)	Jumlah Penyediaan Sarana Kelompok kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (DAK)	Tahun	0	0	1	600.000.000	1	624.000.000	1	648.960.000	1	674.918.400	1	702.000.000	5	3.249.878.400		

	2.14.042.01.03	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR,BKL, PPPKS,PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UppKS)	Jumlah Pengelola Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga yang di orientasi	Kelompok	0	0	2	100.000.000	2	104.000.000	2	108.160.000	2	112.500.000	2	117.000.000	10	541.660.000
	2.14.042.01.04	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksanaan/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR,BKL, PPPKS,PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UppKS)	Jumlah Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga yang di orientasi	orang	0	0	2	100.000.000	2	104.000.000	2	108.160.000	2	112.500.000	2	117.000.000	10	541.660.000
	2.14.042.01.05	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR,BKL, PPPKS,PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UppKS)	Jumlah Pengelola Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	tahun	0	0		150.000.000		156.000.000		162.240.000		168.729.600		175.500.000	0	812.469.600

2.14.042.01.06	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR,BKL, PPPKS,PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Tahun	0	0	1	50.000.000	1	52.000.000	1	54.080.000	1	56.200.000	1	58.448.000	5	270.728.000
2.14.042.01.07	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga(BKB,BKR,BKL,PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Sosialisasi kelompok kegiatan (BKB, BKR, BKL, UPPKS dan PIK - R)	Kegiatan	0	0	2	100.000.000	2	104.000.000	2	108.160.000	2	112.500.000	2	117.000.000	10	541.660.000
2.14.042.01.08	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kela njutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Jumlah Peserta Duta Genre	peserta	1	63.439.800	1	80.000.000	1	83.200.000	1	86.528.000	1	90.000.000	1	93.600.000	5	433.328.000
2.14.042.01.10	Penyediaan dan Pengembangan Materi IPK	Jumlah Pengembangan Materi IPK	dokumen	0	0	1	30.000.000	1	31.200.000	1	32.448.000	1	33.800.000	1	35.152.000	5	162.600.000
2.14.042.01.11	Advokasi dan Promosi IPK	Jumlah Promosi dan Advokasi	Kegiatan	0	0	1	40.000.000	1	41.600.000	1	43.264.000	1	45.000.000	1	46.800.000	5	216.664.000
2.14.042.01.12	Sosialisasi IPK	Jumlah Sosialisasi	Kegiatan	0	0	1	55.000.000	1	57.200.000	1	59.488.000	1	61.800.000	1	64.272.000	5	297.760.000

		<b>Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</b>				<b>430.188.000</b>		<b>545.000.000</b>		<b>566.800.000</b>		<b>589.472.000</b>		<b>613.700.000</b>		<b>638.248.000</b>		<b>2.953.220.000</b>	
2.14.04.2.02																			
2.14.04.2.02.01		Penguatan Kebijakan Daerah dalam Rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga(BKB,BKR,BKL,PPKS,PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Mitra Kerja Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Mitra	0	0	3	35.000.000	3	36.400.000	3	37.856.000	3	40.000.000	3	41.600.000	15	190.856.000	0

	2.14.04.2.02.02	Pemberdayaan Mitra Kerja dan Organisasi Masyarakat dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R, dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Pemberdayaan Mitra Kerja dan organisasi kemasyarakatan	Kegiatan	5	240.484.700	5	260.000.000	5	270.400.000	5	281.216.000	5	292.500.000	5	304.200.000	25	1.408.316.000
	2.14.04.2.02.03	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Masyarakat dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R, dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kader Poktan	Kader	0	0	1	50.000.000	1	52.000.000	1	54.080.000	1	56.200.000	1	58.448.000	5	270.728.000
	2.14.04.2.02.04	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Bagi Mitra Kerja	Jumlah Sosialisasi untuk Calon Pengantin (CATIN)	Kegiatan	1	189.703.300	1	200.000.000	1	208.000.000	1	216.320.000	1	225.000.000	1	234.000.000	5	1.083.320.000
			<b>JUMLAH</b>			<b>8.700.089.097</b>		<b>13.014.000.000</b>		<b>13.534.528.000</b>		<b>14.076.205.600</b>		<b>14.637.183.600</b>		<b>15.238.964.800</b>		<b>70.500.882.000</b>

## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

#### **7.1 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan**

Indikator Penyelenggaraan bidang urusan adalah indikator kinerja yang direncanakan akan dicapai Dinas PPKB dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan, sasaran serta program dan kegiatan.

Indikator Kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat capaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan, indikator kinerja dapat pula diartikan sebagai ukuran keberhasilan yang akan dicapai dalam program/kegiatan yang direncanakan. Adapun tujuan indikator kinerja adalah :

1. Memperjelas tentang apa, berapa dan kapan suatu program/kegiatan dilaksanakan;
2. Menciptakan konsesus yang dibangun bersama oleh pihak terkait untuk menghindari kesalahan interpretasi selama pelaksanaan kegiatan dan dalam menilai kinerjanya;
3. Membangun dasar untuuk pengukuran, analisis dan evaluasi kinerja organisasi/unit kerja masing-masing.

Indikator kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kota Binjai harus mengacu pada sasaran RPJMD yang juga berpedoman pada visi dan misi RPJMD tersebut. Sesuai dengan misi Ketiga yaitu :

**“Mewujudkan Sumber Daya Manusia dan Masyarakat Kota Binjai Yang Berkualitas”**

Juga pada tujuan Ketiga yaitu : **“ Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat Kota Binjai”**

Dari Misi dan tujuan tersebut diatas dapat dilihat sarasannya adalah :

1. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat;
2. Meningkatnya kualitas tenaga kerja.

Dengan berpedoman pada indikator kinerja yang sesuai dengan Sasaran RPJMD tersebut diatas, maka dapat di tetapkan Indikator Kinerja Dinas PPKB Kota Binjai. Kinerja Program dan Kegiatan Renstra 2021-2026 yang telah disesuaikan dengan RPJMD dapat dilihat pada tabel 7.1 berikut ini :

**Tabel 7. 1**  
**Indikator Kinerja DPPKB Kota Binjai**  
**Tahun 2021-2026**

NO	INDIKATOR KINERJA	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					Kondisi Kinerja Akhir RPJMD (Tahun 2026)
				TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Persentase LPP (Laju Pertumbuhan Penduduk)	%	1,07	1,06	1,06	1,06	1,05	1,04	1,04
2.	Persentase TFR	%	2,21	2,21	2,16	2,16	2,1	2,1	2,1
3.	Rasio Ketergantungan Penduduk	%	47	47	47	45	45	45	45
4.	Persentase Jumlah Akseptor KB Aktif (MPCR)	%	68,2	68,3	69,51	70,1	70,64	71,82	71,82
5.	Persentase Kebutuhan Ber-KB yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need)	%	9,05	8,6	8,4	7,3	7,1	7	7
6.	Angka Kelahiran Remaja Umur 15 -19 tahun (ASFR)	Tahun	23	20	18	16	16	15	15
7.	Rata-rata Usia Kawin Pertama Wanita	Tahun	22	22	22,1	22,1	22,5	22,5	22,5
8.	Indeks Pembangunan Keluarga (IPK)	Tahun	55	57	59	61	61	61	61

**Tabel 7.2**  
**Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu Pada Sasaran dan Tujuan RPJMD**

Kode	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD				Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026			Target	Rp.
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			7752232416	8700089097	13014000000	13534528000	14076205600	14637183600	15238964800	79200971097									
02.14.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KOTA BINJAI			5058374953	6423867947	8062000000	8384448000	8719737600	9068954000	9465408000	50124415547									
02.14.02	Program Pengendalian Penduduk	Persentase laju pertumbuhan penduduk		1,07	1,07	1,06	1,06	1,06	1,05	1,05	1,05	1,05								
		Total Fertility Rate (TFR)		2,21	115236223	2,21	208297900	2,21	755000000	2,16	785200000	2,1	816608000	2,1	848600000	2,1	882544000	2,1	4296249900	
		Rasio ketergantungan penduduk		47	47	47	47	45	45	45	44									

02.14.03	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Persentase kebutuhan ber - KB yang tidak terpenuhi (unmet need)		9,05		9,05		8,6		8,4		7,3		7,1		7		7	13831721850
		Persentase Jumlah Akseptor KB Aktif		68,15	2410167000	68,15	1574295450	68,3	2267000000	69,51	2357680000	70,1	2452372000	70,64	2547981600	71,82	2632392800	71,8	
		Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 Tahun (ASFR)		23		23		20		18		16		16		15		15	
02.14.04	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Indeks Pembangunan Keluarga (IPK)		55		55		57		59		61		61		61		61	10948583800
		Rata-rata usia kawin pertama wanita		22	168454240	22	493627800	22	1930000000	22,1	2007200000	22,1	2087488000	22,5	2171648000	22,5	2258620000	22,5	

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

#### **8.1 Kesimpulan**

Dapat disimpulkan bahwa RENSTRA (Rencana Strategik) Tahun 2021 -2026 yang berpedoman pada RPJMD Kota Binjai tahun 2021-2026 ini merupakan Rencana Strategis untuk 5 (lima) tahun kedepan dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Binjai sebagai pedoman/ dasar pelaksanaan semua program/kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan tata laksana yang berlaku untuk membantu mewujudkan visi misi Kepala Daerah / Wali Kota terpilih.

#### **8.2 Saran**

Agar semua Program/kegiatan dari Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kota Binjai yang telah direncanakan untuk 5 (lima )Tahun kedepan dalam Renstra ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, dan dengan capaian target yang memuaskan, maka diharapkan dukungan dari pihak-pihak terkait, baik dari segi Pembinaan maupun dari segi pendanaan , sehingga diperoleh keberhasilan pelaksanaan Program/kegiatan mencapai 100% atau minimal diatas 50 %, pembangunan Kota Binjai akan lebih maju lagi dimasa yang akan datang.

Smoga segala kendala yang akan menghambat nantinya dapat diatasi dengan sebaik-baiknya dan didapatkan hasil pencapaian maksimal dalam masalah pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

Demikian, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.